KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 3 5 1 H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan				H.4 X Final	
				H.2 N Pellibetulali Re- 0 11.3 Tellibatalali				H.5 Tidak Final	
A. IDEN	ITITAS PE	NERIMA PENGHASILA	AN YANG	DIPOTONG					
A.1 NPWP : 8 2 7 4 8 9 0 0 6 7 2 2 0 0 0									
A.2 NIK :									
A.3 Nar	ma :	AHMAD SYARIF							
B. PPh	PASAL 21	YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy)		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
	B.1	B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
	4	21-402-01		2.324.300	2.324.300	0	5	116.215	
Keteran	gan Kode C	Objek Pajak : H	onor dan	Imbalan Lain yang Di	bebankan kepada APBN atau	APBD yang Dite	rima oleh PN	S, Anggota	
B.8 D	Solding Research								
_	Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 3 dd 0 4 mm 2 0 2 0 2 2 yyyy								
PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.									
Nomor: Tanggalddyyyy									
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :									
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :									
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK									
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0 0									
C.2 N									
C.3	C.3 ID Subunit Organisasi :								
C.4 Tanggal :			1 3	1 3 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy					
C.5 Nama Penandatangan : HARI				HARI JUMADI					
C.6 P	Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.								
				i dengan ketentuan yang nik sehingga tidak diperl	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	र mengatur bahwa र	dokumen ini tel	ah ditandatangani secara	

Y59C9PZ4